

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Abdul, Khaliq Farid. "Fikih Politik Islam." *Jakarta:Amzah*, 2005.
- Abdurrahman. Taj.Al-Siyasah al-Syar'iyahwa-al-Fiqh al-Islami. (Mesir: Mathba'ah Daral- Ta'lif, 1993)
- Asshiddiqie, Jimly. "Format kelembagaan negara dan pergeseran kekuasaan dalam UUD 1945." (Yogyakarta :FH UII Press, 2005), 2004.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Pembiayaan Pemilu Di Indonesia. (Jakarta: BAWASLU, 2018)
- Djazuli,Ahmad. "Fiqhsiyasah." *Bandung:Prenada Media*, 2003.
- Departemen Agama RI, al-Qur'an Terjemahan, (Bandung: Quranidea, 2007)
- Dr. Abdul Rasyid Thalib, S.H.M.H. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2018).
- Fadjar, AMukhthie. "Hukum konstitusi dan mahkamah konstitusi," 2006.
- Fahmi, Khairul. *Pemilihan umum & kedaulatan rakyat*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Fuady, Munir. "Teori-teori besar (grand theory) dalam hukum." (Jakarta: Kencana), 2013, 1–2.
- Gozali, Djoni Sumardi. "Ilmu Hukum dan Penelitian Ilmu Hukum." *Yogyakarta: UII Press Yogyakarta*, 2021.
- Herbert, Feith."Pemilihan Umum 1955 di Indonesia." Jakarta:Kepustakaan Populer Gramedia, 1999.

Imam Al-Mawardi. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, terj. Fadli Bahri. (Jakarta: Darul Falah, 2020)

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana, 2016.

Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taymiah Tentang Pemerintahan Islam, alih bahasa Masrinin*, (Jakarta: Risalah Gusti, 1995)

Michael Gallagher dan Paul Mitchell, *The Politics of Electoral Systems*. (Oxford : Oxford University Press, 2005)

Pulungan, J Suyuthi, dan Fiqih Siyasah. “Ajaran.” *Sejarah dan Pemikiran*,(Jakarta: Grafindo Persada, 1997), 1994.

Ramlan, Surbakti. “Memahami Ilmu Politik, Grasindo.” Jakarta, 2007.

Saragih, Bintan Regen. *Lembaga perwakilan dan pemilihan umum di Indonesia*. Gaya Media Pratama, 1988.

Soekanto, Soerjono. “Pengantar penelitian hukum.” (*No Title*), 2006.

Taimiyah, Taqiyyuddin Ibnu. *Siyasah syar’iyah: etika politik Islam*. Risalah Gusti, 1995.

## **ARTIKEL**

Azis, J. K., & Sihombing, I. E. (2023). Perbandingan Antara Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Dan Tertutup di Indonesia: Analisis Menuju Penyelenggaraan Yang Lebih Baik. *Jurnal De Lege Ferenda Trisakti*, 62-68.

Asy’ari, Asnan. “Pemilu Proporsional Terbuka Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah.” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2021.

- Burhanuddin Muhtadi, VOTES FOR SALE Klientelisme, Defisit Demokrasi, dan Institusi. (pada Rapat Senat Terbuka dalam Rangka Pengukuhan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
- Efendi, Yulius. “Penerapan Teori Kedaulatan Rakyat Di Indonesia Dalam Sistem Kekerabatan Dalam Pemerintahan Daerah.” *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 2, no. 3 (2023): 300–311.
- Frenki, Frenki. “Asas-asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah.” *ASAS* 8, no. 1 (2017).
- Katili, Yusril, dan Firman Latuda. “Sistem pemilu proporsional tertutup dalam analisis pemilu 2024.” *Jurnal Analisa Sosial Politik* 1, no. 2 (2022): 172–82.
- Khairunnisa, Maulida, dan Siti Fatimah. “Sistem proporsional terbuka dan tertutup pada pemilu di Indonesia serta kelebihan dan kekurangan.” *Jurnal Tana Mana* 4, no. 1 (2023): 92–100.
- Lubis, Mhd Anzor, Anggreni Atmei Lubis, dan Wenggedes Frensh. “Sistem Pemilihan Umum: Proporsional Terbuka dan Tertutup,” 2023.
- Nurtjahjo, Hendra. “Ilmu negara0pengembangan teori bernegara dan suplemen,” 2005.
- Pramono, Joko, dan Chandra Adjie Prianggodo. “Analisis Efisiensi Sistem Proporsional Terbuka pada Proyeksi Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)* 12, no. 3 (2023): 375–90.
- Putri, Akasyah Amalia, Airell Muhammad Hamdani, Zaki Akhtar Perdana, Rasyid Wiratama Kumbara, Husein Muhaemin

- Garozy, dan Tanti Kirana Utami. “Analisis Teori Perundang-Undangan: Toetsingrecht dalam Tradisi Hukum Eropa Kontinental dan Judicial Review dalam Tradisi Anglo-Saxon.” *PAMARENDA: Public Administration and Government Journal* 4, no. 2 (2024): 325–31.
- Qamar, Nurul. “Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 1, no. 01 (2012): 1–15.
- Rahayu, Mega Putri, A LW Lita Tyesta, dan Ratna Herawati. “Sistem proporsional dalam pemilihan umum legislatif di Indonesia.” *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1–11.
- Ruhenda, dkk, Tinjauan Trias Politika Terhadap Terbentuknya Sistem Politik dan Pemerintahan di Indonesia. *Journal of Governance and Social Policy* (Vol. 1 Issue 2, 2020)
- Simamora, Janpatar. “Analisa Yuridis Terhadap Model Kewenangan Judicial Review Di Indonesia.” *OLD WEBSITE OF JURNAL MIMBAR HUKUM* 25, no. 3 (2013): 388–401.
- Sodikin, S. Pemilihan Umum menurut Hukum Islam. *Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah*, (Vol.1 No. 15, 2019).
- Soemeri, Setio W, Adisti Ikayanti, Agung Wasono, dan Nindita Paramastuti. *Merancang sistem politik demokratis: menuju pemerintahan presidensial yang efektif*. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011.
- Triningsih, Anna. “Politik Hukum Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyelenggaraan Negara.” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (2016): 124–44.
- Vibhisana, Andreas Daniel Adi, Muhammad Rifqi Nugroho, dan Fian Muhammad Rofiulhaq. “DI BAWAH KONTROL PUBLIK: Analisa kritis penerapan sistem proporsional terbuka maupun tertutup terhadap peluang penguatan kontrol publik pada Pemilu 2024.” *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 5, no. 1 (2023): 24–34.

Wery Gusmansyah, Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah. AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Politik Islam (Vol. 2, No. 5)

Widhi, Yuliani Fitriasih. “Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PPU-XX/2022.” *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 1356–66.

Wijaya, Henri. “Menakar Derajat Kepastian Hukum Dalam Pemilu Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.” *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4, no. 1 (2020): 82–104.

## WEBSITE

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Naik 61% Dibanding 2014, Anggaran Penyelenggaraan Pemilu 2019 Capai Rp25,59 Triliun. <https://setkab.go.id/naik-61-dibanding-2014-anggaran-penyelenggaraan-pemilu-2019-capairp2559-triliun/>

Indonesia Corruption Watch , 313 Kasus Politik Uang Ditemukan dalam Pileg 2014  
<https://antikorupsi.org/id/article/313-kasus-politik-uang-ditemukan-dalam-pileg2014>

Hasil-Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indoensia III Tahun 2009 di Padang Panjang. : [https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Ijtima Ulama-2009.pdf](https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Ijtima_Ulama-2009.pdf)

## PERATURAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan Nomor 114/PUU-XX/2022 Tentang Sistem Proposional

Terbuka Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024.